

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

[Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten](#) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan [Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten](#) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada [Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten](#) . Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Serang,        Oktober 2025  
Dir Binmas Polda Banten

Dr. RADEN MUHAMMAD JAUHARI, S.H., S.I.K., M.Si.  
KOMBES POL NRP 81010845

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran	v
II. Neraca	vi
III. Laporan Operasional	vii
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	viii
V. Catatan atas Laporan Keuangan	1
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan [Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten](#) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2025 Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang,        Oktober 2025  
Dir Binmas Polda Banten

Dr. RADEN MUHAMMAD JAUHARI, S.H., S.I.K., M.Si.  
KOMBES POL NRP 81010845

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan [Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten](#) Triwulan III Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2025.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 September 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp920.275.694 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara per 30 September 2025 adalah sebesar Rp3.746.021.380 atau mencapai 70,35 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.325.064.000.

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2025.

Nilai Aset per 30 September 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.086.911.248 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp93.701.664; Aset Tetap (neto) sebesar Rp993.209.584.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp262.751.421 dan Rp824.159.827.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar Rp920.427.388, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp4.172.121.555 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai (Rp3.251.694.167). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp3.251.694.167).

#### **IV. Laporan Perubahan Ekuitas**

Ekuitas pada tanggal 01 Januari Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.206.392.168 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp3.251.694.167) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.869.461.826 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2025 adalah senilai Rp824.159.827.

#### **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 September 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT POLDA BANTEN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025 DAN 2024**

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Cat.	Triwulan III Th 2025				Triwulan III Th 2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	Realisasi
<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>						
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	0	920.275.694	920.275.694	0,00	854.558.698
<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>0</b>	<b>920.275.694</b>	<b>920.275.694</b>	<b>0,00</b>	<b>854.558.698</b>
<b>Belanja</b>	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	3.713.399.000	2.706.578.308	(1.006.820.692)	72,89	2.814.014.689
Belanja Barang	B.4	1.611.665.000	1.039.443.072	(572.221.928)	64,49	1.358.425.785
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>5.325.064.000</b>	<b>3.746.021.380</b>	<b>(1.579.042.620)</b>	<b>70,35</b>	<b>4.172.440.474</b>

**II. NERACA****DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT POLDA BANTEN****NERACA****PER 30 SEPTEMBER 2025 DAN 2024***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CAT	2025	2024
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	39.000.000	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	151.694	0
Persediaan	C.1.3	54.549.970	79.109.590
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>93.701.664</b>	<b>79.109.590</b>
<b>ASET TETAP</b>	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	7.477.405.828	7.478.547.688
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2	(6.484.196.244)	(6.351.265.110)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>993.209.584</b>	<b>1.127.282.578</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.086.911.248</b>	<b>1.206.392.168</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	C.3		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.3.1	223.751.421	0
Uang Muka dari KPPN	C.3.2	39.000.000	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>262.751.421</b>	<b>0</b>
<b>EKUITAS</b>			
EKUITAS	C.4	824.159.827	1.206.392.168
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>824.159.827</b>	<b>1.206.392.168</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>1.086.911.248</b>	<b>1.206.392.168</b>

**III. LAPORAN OPERASIONAL****DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT POLDA BANTEN****LAPORAN OPERASIONAL****PER 30 SEPTEMBER 2025 dan 30 SEPTEMBER 2025***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CAT	2025	2024
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	920.427.388	854.804.472
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>920.427.388</b>	<b>854.804.472</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.2	2.930.329.729	3.064.006.331
Beban Persediaan	D.3	51.059.620	47.430.605
Beban Barang dan Jasa	D.4	578.604.000	548.058.500
Beban Pemeliharaan	D.5	160.296.072	135.261.285
Beban Perjalanan Dinas	D.6	274.043.000	648.106.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	177.789.134	121.990.557
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>4.172.121.555</b>	<b>4.564.853.278</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(3.251.694.167)</b>	<b>(3.710.048.806)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non lancar		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
<b>JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.8	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(3.251.694.167)</b>	<b>(3.710.048.806)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D..9		
Beban Luar Biasa		0	0
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(3.251.694.167)</b>	<b>(3.710.048.806)</b>

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT POLDA BANTEN

#### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CAT	2025	2024
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	<b>1.206.392.168</b>	<b>394.232.789</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	E.2	<b>(3.251.694.167)</b>	<b>(3.710.048.806)</b>
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>			
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.3	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.4	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	0	0
LAIN-LAIN	E.3.6	0	0
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.4	<b>2.869.461.826</b>	<b>3.807.427.920</b>
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS		(382.232.341)	97.379.114
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>824.159.827</b>	<b>491.611.903</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis*

Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok berada di bawah Kapolda, yang dipimpin oleh Dir Binmas dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol)/Eselon II-B, bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerjasama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

#### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan*

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh **Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten**. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

### **A.3. Basis Akuntansi**

#### *Basis Akuntansi*

[Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten](#) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **A.4. Dasar Pengukuran**

#### *Dasar Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan [Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten](#) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

##### *Kebijakan Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari [Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten](#). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan [Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten](#) adalah sebagai berikut:

##### *Pendapatan-LRA*

#### **(1) Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN):

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Pendapatan-LO*

### **(2) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

#### *Belanja*

### **(3) Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Aset*

#### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

#### *Aset Lancar*

#### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh

tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas,

diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### **c. Penyusutan Aset Tetap**

#### *Penyusutan Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah.
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya	4 Tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

##### *Piutang Jangka Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

#### e. Aset Lainnya

##### *Aset Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

##### [Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud](#)

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
Software	4 Tahun

Franchise	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 Tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 Tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### Kewajiban

#### (6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### Penjelasan atas Pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten Telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan adanya Revisi Pagu Minus. Rincian revisi tersebut adalah sebagai berikut:

### Rincian Perubahan Dipa Tahun Anggaran 2025

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan PNB	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	3.713.399.000	3.713.399.000
Belanja Barang	1.611.665.000	1.611.665.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.325.064.000</b>	<b>5.325.064.000</b>

## B.1 Pendapatan

*Realisasi Pendapatan  
Rp920.275.694*

Realisasi Pendapatan Per 30 September 2025 adalah sebesar Rp920.275.694 atau mencapai 0,00 Persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten adalah Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	2.235.694	0,00
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	918.040.000	0,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>920.275.694</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 30 September 2025 mengalami kenaikan sebesar 7,69 persen dibandingkan 30 September 2024.

Hal ini disebabkan Adanya kenaikan Pendapatan PNBPNBP dari Pelayanan Satuan Pengaman di Tahun 2025.

### Perbandingan Realisasi Pendapatan

Triwulan III Tahun 2025

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Realisasi 30 September 2025	Realisasi 30 September 2024	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2.235.694	3.123.698	(28,43)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	918.040.000	851.435.000	7,82
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>920.275.694</b>	<b>854.558.698</b>	<b>7,69</b>

## B.2 Belanja

*Realisasi Belanja  
Rp3.746.021.380*

Realisasi Belanja Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten Per 30 September 2025 adalah sebesar Rp3.746.021.380 atau mencapai 70,35%, dari Anggaran belanja sebesar Rp5.325.064.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 30 September 2025 adalah sebagai berikut:

### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.713.399.000	2.706.578.308	72,89
Belanja Barang	1.611.665.000	1.039.443.072	64,49
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>5.325.064.000</b>	<b>3.746.021.380</b>	<b>70,35</b>
Pegembalian	(0)	(0)	0,00
<b>Jumlah Belanja Netto</b>	<b>5.325.064.000</b>	<b>3.746.021.380</b>	<b>70,35</b>

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir Per 30 September 2025 mengalami penurunan sebesar 10,22 persen dari 30 September 2024.

Hal ini disebabkan adanya Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Perjalanan Dinas di Tahun 2025.

### Perbandingan Realisasi Belanja

TA 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 September 2025	Realisasi 30 September 2024	%
Belanja Pegawai	2.706.578.308	2.814.014.689	(3,82)
Belanja Barang	1.039.443.072	1.358.425.785	(23,48)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.746.021.380</b>	<b>4.172.440.474</b>	<b>(10,22)</b>

### B.3 Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja Pegawai*  
Rp2.706.578.308

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 September 2025 dan 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.706.578.308 dan Rp2.814.014.689. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai Per 30 September 2025 mengalami penurunan sebesar 3,82 persen dari Per 30 September 2024.

Hal ini disebabkan adanya kenaikan Belanja Pegawai di Tahun 2025 berupa Gaji Pokok Polri dan PNS.

### Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

Triwulan III Tahun 2025

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Realisasi 30 September 2025	Realisasi 30 September 2024	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	202.244.599	148.882.562	35,84
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	2.492.813.709	2.653.933.235	(6,07)
Belanja Lembur	11.520.000	11.200.000	2,86
<b>Total Belanja Pegawai Bruto</b>	<b>2.706.578.308</b>	<b>2.814.015.797</b>	<b>(3,82)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(0)	(1.108)	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Pegawai Netto</b>	<b>2.706.578.308</b>	<b>2.814.014.689</b>	<b>(3,82)</b>

#### B.4 Belanja Barang

*Realisasi Belanja Barang  
Rp1.039.443.072*

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 30 September 2025 dan 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.039.443.072 dan Rp1.358.425.785.

Realisasi Belanja Barang Per 30 September 2025 mengalami penurunan sebesar 23,48 persen dari Per 30 September 2024.

Hal ini disebabkan adanya kenaikan penyerapan Belanja Perjalanan Dinas.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang

Triwulan III Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 September 2025	Realisasi 30 September 2024	%
Belanja Barang Operasional	137.098.000	102.754.000	33,42
Belanja Barang Non Operasional	441.506.000	445.304.500	(0,85)
Belanja Barang Persediaan	26.500.000	27.000.000	(1,85)
Belanja Jasa	0	0	0,00
Belanja Pemeliharaan	160.296.072	135.261.285	18,51
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	274.043.000	648.106.000	(57,72 )
<b>Total Belanja Barang Bruto</b>	<b>1.039.443.072</b>	<b>1.358.425.785</b>	<b>(23,48 )</b>
Pengembalian Belanja Barang	(0)	(0)	0,00
<b>Jumlah Belanja Barang Netto</b>	<b>1.039.443.072</b>	<b>1.358.425.785</b>	<b>(23,48 )</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar Rp93.701.664* Jumlah Aset Lancar Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten Per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp93.701.664 dan Rp79.109.590.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara Pengeluaran Rp39.000.000* Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten Per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp39.000.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut

Tabel C.1.1

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
30 September 2025 dan 31 Desember 2024

*(Dalam Rupiah)*

Keterangan	30 September 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai	6.098.744	0

Bank	32.901.256	0
<b>Jumlah</b>	<b>39.000.000</b>	<b>0</b>

### C.1.2. Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak  
Rp151.694*

Piutang Bukan Pajak Per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp151.694 dan Rp0.

Tabel C.1.2

#### Rincian Piutang Bukan Pajak

30 September 2025 dan 31 Desember 2024

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	30 September 2025	31 Desember 2024
Piutang Lainnya	151.694	0
<b>Jumlah</b>	<b>151.694</b>	<b>0</b>

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

### C.1.3. Persediaan

[Persediaan Rp54.549.970](#) Nilai Persediaan Per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp54.549.970 dan Rp79.109.590.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan adalah sebagai berikut:

**Tabel C.1.3**

**Rincian Persediaan**

**30 September 2025 dan 31 Desember 2024**

*(Dalam Rupiah)*

Persediaan	30 September 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	54.549.970	79.109.590
<b>Jumlah</b>	<b>54.549.970</b>	<b>79.109.590</b>

**C.2. Aset Tetap**

[Aset Tetap Rp993.209.584](#) Saldo Aset Tetap [Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten](#) Per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar [Rp993.209.584](#) dan [Rp1.127.282.578](#)

**C.2.1. Peralatan dan Mesin**

[Peralatan dan Mesin Rp7.477.405.828](#) Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah [Rp7.477.405.828](#) dan [Rp7.478.547.688](#).

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.2.1

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024</b>	<b>7.478.547.688</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Transfer Masuk	43.716.140
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Transfer Keluar	(44.858.000)
<b>Saldo Per 30 September 2025</b>	<b>7.477.405.828</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2025	(6.484.196.244)
<b>Nilai Buku Per 30 September 2025</b>	<b>993.209.584</b>

Mutasi Tambah/Kurang Peralatan dan Mesin antara lain adalah:

**Transfer Keluar berupa:**

Mobil Pers Van sebanyak 1 Unit sebesar Rp44.858.000;

**Transfer Masuk berupa:**

1. P.C Unit sebanyak 1 Buah sebesar Rp24.138.070;
2. Lap Top sebanyak 1 Buah sebesar Rp19.578.070;

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin beserta Akumulasi Penyusutannya per 30 September 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.2.2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp6.484.196.244* Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp6.484.196.244 dan Rp6.351.265.110 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Kontruksi Dalam Pengerjaan(KDP).

Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 30 September 2025.

Tabel C.2.2

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*(Dalam Rupiah)*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	7.477.405.828	6.484.196.244	993.209.584
	<b>Jumlah</b>	<b>7.477.405.828</b>	<b>6.484.196.244</b>	<b>993.209.584</b>

### C.3. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka Pendek Rp262.751.421* Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp262.751.421 dan Rp0.

### C.3.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp223.751.421* Utang kepada Pihak Ketiga Per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp223.751.421 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada lingkup Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten Per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.3.1

#### Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	223.751.421
	<b>T o t a l</b>	<b>223.751.421</b>

### C.3.2. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari KPPN Rp39.000.000* Uang Muka dari KPPN per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp39.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau

dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

#### **C.4. Ekuitas**

*Ekuitas Rp824.159.827.*

Ekuitas Per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp824.159.827 dan Rp1.206.392.168. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNBP  
Rp920.427.388*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada periode 30 September 2025 dan 30 September 2024 adalah sebesar Rp920.427.388 dan Rp854.804.472. Pendapatan tersebut terdiri dari:

#### Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

Triwulan III Tahun 2025

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2.387.388	3.369.472	(29,15)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	918.040.000	851.435.000	7,82
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>920.427.388</b>	<b>854.804.472</b>	<b>7,68</b>

Pendapatan PNBP pada Periode 30 September 2025 merupakan Pendapatan Potongan SPM Sewa Rumah Dinas.

### D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai  
Rp2.930.329.729*

Jumlah Beban Pegawai pada periode 30 September 2025 dan 30 September 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.930.329.729 dan Rp3.064.006.331. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat

negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

### Rincian Beban Pegawai

Triwulan III Tahun 2025

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	218.689.087	159.074.889	37,48
Beban Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	2.700.120.642	2.893.731.442	(6,69)
Beban Lembur	11.520.000	11.200.000	2,86
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>	<b>2.930.329.729</b>	<b>3.064.006.331</b>	<b>(4,36)</b>

### D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan  
Rp51.059.620*

Jumlah Beban Persediaan pada periode 30 September 2025 dan 30 September 2024 masing-masing adalah sebesar Rp51.059.620 dan Rp47.430.605. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

### Rincian Beban Persediaan

Triwulan III Tahun 2025

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	%
--------	-------------------	-------------------	---

Beban Persediaan Konsumsi	51.059.620	47.430.605	7,65
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>51.059.620</b>	<b>47.430.605</b>	<b>7,65</b>

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa  
Rp578.604.000*

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 September 2025 dan 30 September 2024 masing-masing adalah sebesar Rp578.604.000 dan Rp548.058.500. Beban Barang dan Jasa terdiri dari Beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

#### Rincian Beban Barang dan Jasa

Triwulan III Tahun 2025

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	24.540.000	24.540.000	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	46.440.000	13.500.000	244,00
Beban Barang Operasional Lainnya	66.118.000	64.714.000	2,17
Beban Bahan	439.506.000	443.304.500	(0,86)
Beban Honor Output Kegiatan	2.000.000	2.000.000	0,00
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa</b>	<b>578.604.000</b>	<b>548.058.500</b>	<b>5,57</b>

#### D.5. Beban Pemeliharaan

**Beban Pemeliharaan**  
Rp160.296.072

Jumlah Pemeliharaan 30 September 2025 dan 30 September 2024 masing-masing adalah sebesar Rp160.296.072 dan Rp135.261.285. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Pemeliharaan**

Triwulan III Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	160.296.072	135.261.285	18,51
<b>Jumlah Beban Pemeliharaan</b>	<b>160.296.072</b>	<b>135.261.285</b>	<b>18,51</b>

**D.6. Beban Perjalanan Dinas**

**Beban Perjalanan Dinas**  
Rp274.043.000

Beban Perjalanan Dinas periode 30 September 2025 dan 30 September 2024 masing-masing adalah sebesar Rp274.043.000 dan Rp648.106.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Perjalanan Dinas**

Triwulan III Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	268.843.000	638.556.000	(57,90)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.200.000	9.550.000	(45,55)

<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>274.043.000</b>	<b>648.106.000</b>	<b>(57,72)</b>
--------------------------------------	--------------------	--------------------	----------------

### D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp177.789.134*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 30 September 2025 dan 30 September 2024 masing-masing adalah sebesar Rp177.789.134 dan Rp121.990.557. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

#### Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Triwulan III Tahun 2025

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	177.789.134	121.990.557	45,74
<b>Jumlah Beban Penyusutan</b>	<b>177.789.134</b>	<b>121.990.557</b>	<b>45,74</b>
Beban Amortisasi Software	0	0	0,00
Beban Amortisasi Lisensi	0	0	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Pemerintah	0	0	0,00
<b>Jumlah Beban Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>177.789.134</b>	<b>121.990.557</b>	<b>45,74</b>

### D.8. Beban Penyisihan Tidak Tertagih

*Beban Penyisihan Tidak Tertagih Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 30 September 2025 dan 30 September 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut:

#### Rincian Beban Penyisihan Tidak Tertagih

Triwulan III Tahun 2025

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	%
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang-Tunjangan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0,00
<b>Jumlah Beban Penyisihan Tidak Tertagih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### D.9. Kegiatan Non Operasional

*Kegiatan Non Operasional Rp0*

Pos Surplus Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Per 30 September 2025 dan 30 September 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0

dan Rp0. Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

### Rincian Kegiatan Non Operasional

Triwulan III Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	%
<b>Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0,00
<b>Jumlah Surplus/Defisit Penyelesaian Jangka Panjang</b>	0	0	0,00
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	0	0	0,00
<b>JUMLAH SUPRLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	0	0	0,00

#### D.10. Pos Luar Biasa

*Pos Luar Biasa Rp.0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa periode 30 September 2025 dan 30 September 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### **E.1. Ekuitas Awal**

*Ekuitas Awal  
Rp1.206.392.168*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.206.392.168 dan Rp394.232.789.

### **E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO**

*Defisit LO Rp3.251.694.167*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.251.694.167 dan Rp3.710.048.806. Surplus (Defisit) LO merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

### **E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi**

*Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Akuntansi Rp.0*

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

#### **E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset**

*Penyesuaian Nilai Aset Rp0*

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

#### **E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan**

*Koreksi Nilai Persediaan  
Rp0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode

sebelumnya. Koreksi atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Rincian Koreksi Nilai Persediaan 30 September 2025

No	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Amunisi	0
3.	Suku Cadang	0

**E.3.3. Koreksi Atas Reklasifikasi**

*Koreksi Atas Reklasifikasi  
Rp0*

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi atas reklasifikasi digunakan untuk menyajikan akun koreksi atas reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya yang dihasilkan dari transaksi reklasifikasi masuk dan keluar BMN dari Aplikasi Sakti Modul persediaan dan Modul Aset.

Tabel 3.3

Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi 30 September 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Persediaan	0
Peralatan dan Mesin	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

**E.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap**

**Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

**E.3.5. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi****Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

**Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi 30 September 2025**

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	0
Peralatan dan Mesin	(0)
Akum.Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Akum.Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Aset Tetap Renovasi	(0)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	(0)
Aset Tetap Tidak Digunakan	0
Akum.Penyusutan Aset Tetap Tidak Digunakan	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

**E.3.6. Koreksi Lain-Lain**

**Koreksi Lain-Lain Rp0**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Tabel 3.6

**Rincian Koreksi Lain-Lain 30 September 2025**

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Lainnya	0
Ekuitas Transaksi Lainnya	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

**E.4. Transaksi Antar Entitas****Transaksi Antar Entitas  
Rp2.869.461.826**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.869.461.826 dan Rp3.807.427.920. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

Tabel. 4

**Rincian Transaksi Antar Entitas 30 September 2025**

Uraian	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.746.021.380
Diterima dari Entitas Lain	(920.275.694)
Transfer Masuk	43.716.140
Transfer Keluar	(0)

Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(0)
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung TAYL	0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp2.869.461.826</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri-dari:

#### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

DDEL/DKEL merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025, DDEL sebesar Rp920.275.694 sedangkan DKEL sebesar Rp3.746.021.380.

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 sebesar Rp43.716.140 terdiri dari:

**Tabel.4.2**

#### **Transfer Masuk 30 September 2025**

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Persediaan	Satker Polri/Polda Banten	0
2.	Peralatan dan Mesin	Satker Polri/Polda Banten	43.716.140

3.	Penyusutan Peralatan dan Mesin	Satker Polri/Polda Banten	(0)
4.	Gedung dan Bangunan	Satker Polri/Polda Banten	0
5.	Penyusutan Gedung dan Bangunan	Satker Polri/Polda Banten	(0)
6.	Software	Satker Polri/Polda Banten	0
7.	Penyusutan Amortisasi Software	Satker Polri/Polda Banten	(0)
8.	Lisensi	Satker Polri/Polda Banten	0
9.	Penyusutan Lisensi	Satker Polri/Polda Banten	(0)

Sedangkan Transfer Keluar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 sebesar Rp0 terdiri dari:

Tabel 4.2

Transfer Keluar TA 2024

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Persediaan	Satker Polri/Polda Banten	0
2.	Peralatan dan Mesin	Satker Polri/Polda Banten	44.858.000
3.	Penyusutan Peralatan dan Mesin	Satker Polri/Polda Banten	(44.858.000)
4.	Gedung dan Bangunan	Satker Polri/Polda Banten	0
5.	Penyusutan Gedung dan Bangunan	Satker Polri/Polda Banten	(0)
6.	Software	Satker Polri/Polda Banten	0
7.	Penyusutan Software	Satker Polri/Polda Banten	(0)
8.	Lisensi	Satker Polri/Polda Banten	0
9.	Penyusutan Lisensi	Satker Polri/Polda Banten	(0)

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 sebesar Rp0.yaitu terdiri dari berupa hibah uang sebesar Rp0 dan berupa hibah barang sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Pengesahan Hibah Langsung 30 September 2025**

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	PT.XXX	Barang	0
2.	H.XXX	Barang	0
3.	H.BBB	Barang	0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung 30 September 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

**E.5. Ekuitas Akhir**

*Ekuitas Akhir*  
*Rp824.159.827*

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp824.159.827 dan Rp491.611.903.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

Satker Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten pada Penyusunan Laporan Keuangan 30 September 2025 telah melaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN melalui Aplikasi Monsakti.

### **F.2. Pengungkapan Lain-Lain**

Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten Telah membuat Surat Keputusan Nomor : Kep/29/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran.

### **F.3. Pengelolaan Rekening**

Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten memiliki Rekening Bendahara Pengeluaran/BPG 020 Binmas Polda Banten dengan Nomor Rekening 652376786721000 telah mendapatkan persetujuan dari KPPN dengan Nomor : 12/KP03/2020 Tanggal 12 November 2020 dengan Saldo Per 30 September 2025 sebesar Rp0,00.

### **F.4. Prioritas Nasional (PN)**

**LAPORAN REKENING DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT POLDA BANTEN S.D TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN  
2025**